

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD dengan opini audit sebagai variabel moderasi untuk LKPD yang berada di pulau Jawa. Berdasarkan atas hasil yang didapatkan pada penelitian ini yang dijelaskan pada bab IV, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut.

- a. Rasio kemandirian keuangan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan rasio kemandirian keuangan yang tinggi berdasarkan PAD yang diterima langsung dari masyarakat kepada pemda memberikan sebuah tekanan kepada pemda untuk melakukan pengungkapan LKPD yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab pemda.
- b. Belanja modal sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya belanja modal yang dimiliki suatu pemda tidak menjamin bahwa adanya perhatian yang tinggi dari prinsipal, sehingga pemda tidak mendapatkan tekanan yang tinggi untuk melakukan pengungkapan LKPD.
- c. *Intergovernmental revenue* sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal itu menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* sebagai *transfer* yang diberikan sebagai biaya operasional dari pemerintah pusat kepada pemda, memberikan tekanan dalam hal pengungkapan LKPD yang memiliki hubungan negatif.
- d. *Legislative size* sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut bahwa banyaknya anggota DPRD pemda di pulau Jawa tidak menjamin sebuah tekanan tinggi kepada pemda untuk mengungkapkan LKPD dikarenakan ada prinsipal lain yang memberikan tekanan kepada pemda sehingga *legislative size* tidak memberikan tekanan cukup besar kepada pemda untuk mengungkapkan LKPD.

- e. Opini audit sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh rasio kemandirian keuangan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemda dengan nilai rasio kemandirian keuangan yang tinggi akan memberikan tekanan terhadap pemda untuk melakukan pengungkapan LKPD dengan tinggi, sehingga opini audit WTP akan menjadi sebuah hasil yang didapatkan oleh pemda tersebut.
- f. Opini audit sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang direalisasikan oleh pemda tidak menjadi sebuah perhatian penting dalam pengawasan. Sehingga opini audit WTP tidak memperkuat hubungan belanja modal dengan tingkat pengungkapan LKPD.
- g. Opini audit sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa seberapa besar *intergovernmental revenue* yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda tidak akan mempengaruhi hubungan dengan opini audit yang dihasilkan. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat tidak memberikan perhatian secara detail yang terpenting dilakukan pengungkapan sesuai peraturan yang berlaku.
- h. Opini audit sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh *legislative size* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini audit memiliki hubungan terhadap anggota DPRD dengan tingkat pengungkapan LKPD. Banyaknya suatu anggota DPRD akan memberikan motivasi terhadap pemda untuk melakukan pengungkapan LKPD dengan tinggi.

V.2 Saran

Berdasarkan atas pengujian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini terdapat saran sebagai referensi, sehingga dapat memberikan manfaat secara teori ataupun secara langsung di lapangan. Saran yang diberikan peneliti sebagai berikut.

a. Saran Teoritis

Pada penelitian ini memiliki beberapa saran kepada penelitian selanjutnya yaitu untuk menggunakan sampel pemerintahan daerah yang lebih banyak seperti LKPD di Indonesia agar data penelitian yang digunakan dapat valid dan lebih mendalam untuk digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya, pada penelitian selanjutnya jika menggunakan data penel disarankan untuk memperpanjang periode penelitian dikarenakan peneliti hanya menggunakan tahun penelitian sebagai sampel yang cukup singkat hanya 2018-2020, sehingga tidak dapat mengetahui perkembangan secara besar pada suatu pemerintah daerah. Pada penelitian ini, hasil yang didapat pada variabel independen yaitu belanja modal dan *legislative size* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Selain itu, opini audit tidak memoderasi hubungan belanja modal dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian selanjutnya disarankan peneliti untuk menggunakan variabel lain seperti yang digunakan Handayani et al. (2020) yaitu terkait faktor keuangan berupa *local government size*, dan *local autonomy*. Selain itu, terkait faktor non-keuangan berupa *total government unit*, dan *political environment*.

b. Saran Praktis

1) Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah yang berada di pulau Jawa diharapkan kedepannya dapat lebih mengoptimalkan dalam melakukan pengungkapan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Kemudahan era teknologi sekarang dapat lebih mempermudah pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan LKPD. Kemudahan teknologi menjadi sebuah pertimbangan untuk melakukan transparansi terhadap masyarakat daerah tersebut, karena masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.

2) Bagi pemerintah pusat

Bagi pemerintah pusat sebagai salah satu prinsipal bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memperketat pelaksanaan monitoring atau pengawasan kepada pemerintah daerah. Selain itu sebagai pemerintah

pusat perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah pemda telah menggunakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat dengan bijak atau tidak. Maka dari itu, pemda akan mendapatkan sebuah tekanan dari pemerintah pusat untuk mengungkapkan LKPD dengan tinggi.